



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 20 Oktober 2016

Halaman: 4

PENANGANAN KAWASAN KUMUH KOTAKU Tahun 2016 Sasar 10 Kelurahan

YOGYA (MERAPI) - Penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta menjadi pekerjaan panjang. Salah satu program penanganan kawasan kumuh itu dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang tahun ini menyasar di 10 kelurahan. "Penanganan kawasan kumuh dengan program Kotaku tahun ini baru pendampingan di sepuluh kelurahan. Tahapannya penyusunan Detail Engineering Design (DED)," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad, Rabu (19/10).

Mengacu Surat Keputusan Walikota Nomor 393 Tahun 2014 tentang kawasan kumuh luasan-nya sekitar 278 hektare yang tersebar di 36 kelurahan. Luas kawasan kumuh itu sekitar 8 persen dari total wilayah Kota Yogyakarta. Sebagian besar kawasan kumuh itu ada di bantaran sungai.

Dia menjelaskan penanganan kawasan kumuh tahun ini melanjutkan program dari kawasan kumuh yang ditetapkan Walikota dari 278 hektare menjadi 264 hektare. Penataan kawasan kumuh itu merupakan bagian dari Program Presiden RI hingga 2019.

"Dalam program Kotaku penataan kawasan kumuh dilakukan melalui pemberdayaan masya-

rakat. Dananya dari pemerintah pusat," ujarnya.

Menurutnya sebagian penanganan kawasan kumuh juga dilakukan dengan program penataan kawasan kumuh melalui penyediaan barang dan jasa. Salah satu kawasan kumuh yang telah dikerjakan adalah di wilayah Mrican Kelurahan Giwangan. Selain itu sebanyak empat kelurahan lain yaitu di Prenggan, Pandeyan, Warungboto dan Rejowinangun juga akan menjadi sasaran penanganan kawasan kumuh melalui program Eco district. Program itu menekankan pada pembangunan yang lebih memperhatikan sisi ekologi atau lingkungan dan bina ekonomi warga secara berkelanjutan.

Dia menjelaskan 4 kelurahan itu dipilih karena melihat dari potensi yang ada. Wilayah itu cukup strategis dan ada dukungan dari warga sekitar. Dari sisi potensi pariwisata dan ekonomi di tiga wilayah itu, dengan keberadaan XT Square, Situs Warungboto dan kawasan sejarah Kotagede. Sebagian menggunakan dana hibah dari Prancis melalui pemerintah pusat.

"Tim dari pusat belum lama ini meninjau, tapi masih belum dipastikan nilai bantuannya. Tapi wujudnya dengan penataan dari bina lingkungan, ekonomi dan penguatan sumber daya manusia," pungkas Edy.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005